

## DIPLOMASI KOTA SEMARANG INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KOTA BEBAS BANJIR TAHUN 2016 – 2022

<sup>1</sup>Anna Yulia Hartati, <sup>2</sup>Yuwanto, <sup>3</sup>Teguh Yuwono, <sup>4</sup>Muhammad Adnan

<sup>1</sup>Universitas Wahid Hasyim, <sup>1,2,3</sup>Universitas Diponegoro

Email: [annayulia@unwahas.ac.id](mailto:annayulia@unwahas.ac.id)

### Abstrak

*Diplomasi kota merupakan bentuk diplomasi yang melibatkan keterlibatan kota atau daerah dalam hubungan internasional. Konsep ini mengacu pada upaya kota atau daerah untuk membawa kepentingan mereka ke ranah internasional yang sejalan dengan kepentingan negara. Diplomasi kota dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, pariwisata, lingkungan, dan penanganan masalah seperti pandemi atau banjir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana diplomasi kota Semarang dalam mewujudkan kota bebas banjir. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi kota, dengan metode penelitian kualitatif dengan data primer wawancara dan data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah kota Semarang. Temuan dari penelitian ini adalah diplomasi kota Semarang dalam mewujudkan kota bebas banjir dengan cara melibatkan kerjasama internasional, partisipasi dalam forum internasional, promosi potensi lokal, upaya mendapatkan dukungan dalam penanganan banjir dan Peningkatan kapasitas pemerintah daerah.*

**Kata Kunci:** *Diplomasi Kota Semarang, Kerjasama Internasional, Kota Bebas Banjir*

### A. Pendahuluan

Globalisasi mendorong terbentuknya interaksi semakin kompleks sebab adanya internasional bias. Michele Acuto menganggap faktor ini mendorong pula terjadinya urbanisasi karena kesejahteraan, budaya, dan komunitas baru yang menjanjikan berada di kota. Urbanisasi yang terjadi pada akhirnya akan melahirkan relationship sehingga mampu menentukan keterlibatan daerah dalam situasi tertentu (Acuto, 2013). Rogier van der Pluijm menyebutkan bahwa paradiplomasi merupakan aktor-aktor di panggung politik internasional turut terlibat dalam hubungannya dengan suatu kota. Tujuannya untuk mewakili diri sendiri serta untuk kepentingan satu sama lain (Pluijm & Melissen, 2007).

Paradiplomasi merupakan bentuk diplomasi yang bertujuan membawa kepentingan kota atau daerah ke ranah internasional yang sejalan kepentingan negara. (M. L. Fathun, 2016). *City as place* dimana kota harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan metropolis untuk ditinggali, tempat berusaha, dan tempat komunitas. Kemudian, *city as actors* dimana

kota dapat bergerak memetakan potensinya untuk berkompetisi dan membuat *branding*. Dengan demikian, kota dapat dikenal dan berkontribusi dalam pembangunan nasional dan internasional.

Paradiplomasi sangat penting untuk dikembangkan suatu daerah. Pendekatan ini mampu menjadikan daerah sebagai aktor global. Dengan demikian, kepentingan daerah dan masyarakat dapat diangkat ke ranah global. Misalnya kepentingan dalam bidang ekonomi, migrasi terhadap daerahnya, hingga menjadi mediator konflik. Kemudian daerah dapat menghadirkan diplomat kota sebagai representasi masyarakat di ranah internasional, yang menyuarakan dan menyampaikan permasalahan-permasalahan di kotanya. (Sustianingsih, Hermi, 2018). Melissen menyebutkan bahwa terdapat enam dimensi peran paradiplomasi diantaranya keamanan, pembangunan, ekonomi, representasi, *networking*, dan budaya (Pluijm & Melissen, 2007).

Kota Semarang pernah mengalami banjir besar di Pecinan era kolonial Belanda, di dalam catatan itu digambarkan jembatan hanyut terus genangan air selama beberapa hari tidak surut. Ini untuk menunjukkan bahwa banjir Semarang masa lalu juga terjadi. Ada juga catatan petualang Belanda yang menggambarkan kondisi Kampung Melayu yang kumuh dan kalau hujan turun kawasannya tergenang. Maka pada akhir abad ke-19 atau sekitar tahun 1890-an, Pemerintah Belanda mulai memikirkan supaya air tidak masuk ke tengah kota. Maka dibangunlah Kanal Banjir Barat.

Aliran Sungai Semarang sendiri dibuat berbelok sebelum Banjir Kanal Barat dibangun..Teknik pengalihan aliran sungai ini diterapkan pemerintah kolonial agar aliran Sungai Semarang tidak memasuki kawasan kota yang disesaki permukiman padat. Sungai Semarang sebenarnya kalau dari selatan sebelum Pleret membelok ke kanan, masuk ke belakang Mapolrestabes, kemudian di Pasar Kembang tembus di Lawang Sewu,. Kanal Banjir Barat dan Kanal banjir Timur dibuat dalam perhitungan Pemerintah Belanda bahwa kedua sungai ini banyak bermukim warga. Oleh karenanya, diperlukan aliran sungai yang aman dari banjir. Pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda tidak memperhitungkannya. Hal itu dikarenakan pada masa lampau sungai-sungai tersebut belum bermasalah.

Sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an, rawa-rawa di Tanah Mas itu diuruk untuk membangun real estate pertama di Semarang. Padahal itu daerah tangkapan air. Dampaknya, genangan air terjadi di sekitarnya. Boom Lama itu dulu langganan banjir. Itu. Kota Semarang terletak di wilayah pantai utara Pulau Jawa, sehingga memiliki potensi banjir rob. Banjir merupakan peristiwa terjadinya aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pada tahun

1980, luas banjir genangan di Kota Semarang mencapai luas sekitar 762,775 ha. Beberapa faktor penyebab banjir di Kota Semarang antara lain jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, serta perkembangan kehidupan manusia dengan permasalahan. Masalah utama yang dihadapi di Kota Semarang adalah banjir dengan genangan yang cukup lama.(semarangkota.go.id, 2023)

Semarang merupakan ibukota propinsi dari Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan kota ATLAS. Kota semarang mempunyai letak geografis yang sangat menarik, Semarang mempunyai pantai sekaligus dataran tinggi, kondisi yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia. Kita dapat melihat pantai dari ketinggian di kota perbukitan semarang atas, yang dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit dari pantai menuju perbukitan. Pusat kota semarang sendiri berada di sekitar simpang lima, kota ini mempunyai pelabuhan tanjung emas.

Potensi dari letak semarang yang berada di pinggir pantai tentunya, namun letak yang berada di pinggir pantai bukannya membawa berkah bagi masyarakat semarang justru letak yang berseberangan dengan laut jawa menjadikan daerah ini langganan banjir rob. Banjir melanda bukan hanya setiap tahun, di daerah-daerah tertentu banjir ini malah menjadi permanen. Air yang kotor karena tidak mengalir pun menjadikan masalah baru. Bukan tanpa usaha, pemerintah kota semarang berusaha mengatasi banjir rob ini dengan membuat sebuah polder/ danau buatan di depan stasiun tawang untuk mengurangi banjir rob tersebut dengan memompa air ke dalam polder buatan itu, peninggian tanggul sungai pun dilakukan.

Banjir menggenangi daerah semarang utara, mulai dari terminal terboyo, genuk, stasiun tawang, Jalan Hasanudin, Jalan M.T. Haryono, Jalan Kakap, Jalan Tanah Mas, hingga kawasan kota lama. Penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah, tidak adanya hutan kota yang bisa menyerap air dan semakin tingginya permukaan air laut menjadi alasan utama banjir rob ini hingga saat ini belum terselesaikan. Rumah warga maupun jalan disana pun sudah ditinggikan berkali-kali, namun ketinggian genangan air rob yang setiap tahun bertambah membuat usaha warga sepertinya sia-sia. Genangan yang meninggi ketika air laut pasang ditambah air hujan semakin membuat banjir rob menjadi-jadi. Bukan tak mungkin apabila tidak ada solusi dan area banjir rob semakin meluas maka akan membuat seluruh kota semarang yang berada di semarang bawah akan terkena banjir dan menjadi banjir rob seumur hidup bagi warga semarang. Kerugian secara material berupa macetnya sendi-sendi ekonomi hingga penyakit akibat banjir pun tidak dapat dihindari. Dari fakta empiris dan data

awal, maka muncul pertanyaan bagaimana proses diplomasi kota Semarang dalam mewujudkan kota Semarang bebas banjir.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian mengenai diplomasi kota Semarang dalam mewujudkan kota bebas banjir dapat menggunakan metode kualitatif eksplanatif studi literatur dan menggunakan analisis teori paradiplomasi dan konsep diplomasi kota. Metode ini dapat dilakukan dengan cara melakukan studi literatur terkait dengan diplomasi kota dan paradiplomasi dalam konteks penanganan banjir, baik di Indonesia maupun di negara lain. Selain itu, dapat dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah kota, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperoleh informasi terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Selain itu, metode penelitian lain yang dapat digunakan adalah observasi langsung terhadap kondisi banjir di Kota Semarang dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota dalam penanganan banjir. Metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan kondisi banjir di Kota Semarang dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota dalam penanganan banjir.

Dalam penelitian ini, analisis teori paradiplomasi dan konsep diplomasi kota dapat digunakan untuk memahami upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota dalam penanganan banjir dan bagaimana upaya-upaya tersebut dapat ditingkatkan melalui diplomasi kota. Analisis teori ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep yang terkait dengan diplomasi kota dan paradiplomasi, serta menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks penanganan banjir di Kota Semarang.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan banjir sejak dulu. Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, Kota Semarang terletak di Muara Kali Semarang dengan struktur tanah berupa lapisan alluvium yang terbentuk akibat sedimentasi oleh banjir. Pengembangan wilayah pesisir melalui reklamasi pantai dan pengambilan air tanah secara berlebihan menyebabkan terjadinya penurunan tanah secara berlebihan menyebabkan terjadinya penurunan tanah di wilayah utara Kota Semarang

sehingga permasalahan genangan menjadi makin serius atau yang sering disebut rob. Rob adalah genangan akibat pasang muka air laut. Rob menambah permasalahan genangan di Kota Semarang. Walaupun demikian permasalahan kronis genangan saat ini akan segera terselesaikan khususnya genangan yang terjadi di wilayah tengah Kota Semarang. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sejak zaman kolonial Hindia Belanda, hulu Kali Semarang dialirkan ke Barat atau Kanal Banjir Barat mulai dari lokasi Bendung Simongan. Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum telah bekerja sama dalam mengatasi permasalahan genangan di Kota Semarang sejak dahulu.

Rob dan banjir merupakan salah satu masalah bagi warga Kota Semarang maupun masyarakat pengguna alat transportasi yang melalui daerah Kota Semarang, khususnya daerah Semarang Utara yang sering terkena rob dan banjir yang sering merasakan tidak nyaman dalam berkendara. Karena kendaraan akan cepat keropos terkena genangan air rob dan banjir, sedangkan dampak sosialnya seperti transportasi akan terhambat jalannya dan mengakibatkan perekonomian kurang lancar, serta wisatawan pun akan kurang tertarik datang ke Kota Semarang jika melewati daerah tersebut. Rob dan banjir merupakan persoalan di Kota Semarang yang menjadi masalah utama Kota Semarang. Ada perbedaan pengertian rob dan banjir, Rob adalah istilah lain untuk menyebutkan banjir pasang surut, kawasan tersebut memiliki ketinggian permukaan tanah yang lebih rendah dari pada permukaan air laut pada saat air laut pasang. Keadaan itu bersifat permanen. Artinya adalah banjir pasang surut rutin terjadi di kawasan itu dan diperlukan campur tangan manusia untuk menghindarinya. Banjir di Kota Semarang tiap tahunnya terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 selalu meningkat. Peningkatan banjir dan rob di Kota Semarang disebabkan karena adanya perubahan iklim global, degradasi lingkungan, dan bertambahnya jumlah penduduk makin memperbesar ancaman risiko bencana. Bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang besar.

Selain itu, meningkatnya urbanisasi di wilayah Kota Semarang juga mengakibatkan dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lahan. Semakin banyaknya kegiatan manusia mengakibatkan meningkatnya kebutuhan air. Kebutuhan air yang semakin tinggi akan menimbulkan pemanfaatan air tanah secara besar-besaran atau eksploitasi air tanah. Eksploitasi air tanah menimbulkan penurunan volume/debit pengisian kembali air tanah. Pemompaan air tanah yang melebihi daya dukung air yang tersedia tanpa memperhatikan kemampuan pengisian kembali dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah (Kodoatie, 1996). Penurunan muka

air tanah ini dapat menyebabkan amblesnya permukaan tanah dan intrusi air laut (Asdak, 1995).

### **C.1. Kerjasama lintas batas**

Diplomasi kota dapat digunakan untuk menjalin kerjasama dengan kota atau daerah lain yang memiliki pengalaman dalam penanganan banjir. Melalui kerjasama ini, Kota Semarang dapat mempelajari praktik terbaik dan memperoleh bantuan teknis dalam mengembangkan strategi penanganan banjir yang efektif. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk penanganan banjir dan rob. Ada dua skema yang dijajaki dalam rencana kerja sama Pemkot Semarang dengan Pemerintah Negeri Kincir Angin yaitu pengelolaan pompa secara langsung, atau transfer knowledge. Bentuk yang pertama adalah bantuan pengelolaan pompa penyedot banjir. Sedangkan bantuan yang kedua, adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan tentang pengendalian banjir. Pemerintah Belanda mengirimkan tim program Blue Deal yang terdiri dari perwakilan Otoritas Air Belanda serta Kementerian Luar Negeri Belanda dan Infrastruktur dan Pengelolaan Air dan kerja sama dengan Pemerintah Belanda melalui program Blue Deal juga dijajaki sampai 31 Desember 2027, atau bahkan dapat diperpanjang hingga 31 Desember 2030. (wawancara dengan walikota Semarang Hendrar Prihadi periode 2016-2021 dan 2021-2022, mei 2023)

Beberapa lokasi di kota Semarang yang sering menjadi langganan banjir dan rob adalah (1) Kecamatan Gayamsari, tinggi genangan 40-75 dan lama genangan 4-72 jam, (2) Kecamatan Tugu, tinggi genangan 20-200 cm dan lama genangan 1-72 jam, (3) Kecamatan Semarang Barat, tinggi genangan 30-100 cm dan lama genangan 1-9 jam, (4) Kecamatan Semarang Tengah, tinggi genangan 10-50 cm dan lama genangan 1-5 jam, (5) Kecamatan Semarang Utara, tinggi genangan 20-75 cm dan lama genangan 3-24 jam, (6) Kecamatan Ngaliyan, tinggi genangan 50-80 cm dan lama genangan 1-3 jam, (7) Kecamatan Pedurungan, tinggi genangan 30-90 cm dan lama genangan 3-72 jam, (8) Kecamatan Semarang Timur, tinggi genangan 10-60 cm dan lama genangan 3-72 jam. Total luas genangan di Kota Semarang mencapai 2.111,84 hektar. Usaha dalam menangani masalah banjir dan rob sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Belanda dengan membangun Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) pada abad ke-19. BKT dan BKB difungsikan untuk mengalirkan luapan air yang berasal dari Kota Semarang atas langsung ke laut. Pembangunan BKT dan BKB tersebut nampaknya belum mengurangi masalah banjir

dan rob. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang membangun sebuah polder di depan stasiun Tawang guna mengurangi banjir dan rob di Kota Semarang yang digunakan untuk menampung curah air hujan agar tidak menggenang di sekitar kawasan Stasiun Tawang. Air di polder itu jika sudah mendekati ambang batas akan disedot atau dipompa dengan penyedot air, air kurasan polder tersebut dialirkan ke Kalibaru untuk mengalir ke laut. Nampaknya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan pihak Belanda tersebut tidak berhasil. Penanganan rob telah dilakukan oleh Pemerintah hingga menelan dana hingga Rp500 miliar, hanya dapat mengatasi 2/3 wilayah rob di Kota Semarang saja.

Melihat segala problematika yang terjadi di Kota Semarang dan terutama dikarenakan fenomena rob dan banjir menjadi persoalan perekonomian, maka harus ada penanganan pengendalian dari pemerintah yang serius agar tidak berlarut-larut dalam keadaan rob dan banjir yang terjadi di Kota Semarang, oleh karena itu dirasakan perlu adanya penelitian terkait evaluasi proses kebijakan penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Semarang berserta dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lain lain. untuk mengetahui sejauh mana proses penanganan banjir rob di kota Semarang oleh Pemkot Semarang dapat berjalan efektif.

## **C.2. Partisipasi dalam forum internasional**

Melalui diplomasi kota, Kota Semarang dapat berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas isu-isu penanganan banjir. Dalam forum ini, Kota Semarang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, berbagi pengalaman, dan menjalin kerjasama dengan kota atau daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Partisipasi Kota Semarang dalam jejaring 100 Resilient Cities (100RC) telah memberikan kesempatan bagi kota tersebut untuk berkolaborasi dengan institusi internasional dan berbagi pengetahuan dan keahlian dalam mengatasi berbagai tantangan ketahanan, termasuk penanganan banjir. Berikut beberapa cara di mana partisipasi Semarang dalam jejaring 100RC membantu dalam menangani banjir: Berbagi pengetahuan dan keahlian: Partisipasi Semarang dalam jejaring 100RC memungkinkan kota tersebut untuk berbagi pengalaman dan belajar dari kota-kota lain dalam jejaring tersebut tentang bagaimana mengatasi tantangan penanganan banjir.

Akses ke sumber daya: Jejaring 100RC menyediakan akses ke sumber daya seperti pendanaan, bantuan teknis, dan kemitraan dengan organisasi sektor swasta dan publik, yang dapat mendukung upaya Semarang dalam penanganan banjir. Pengembangan strategi

ketahanan: Sebagai anggota jejaring 100RC, Semarang telah mengembangkan strategi ketahanan kota yang mencakup penanganan banjir sebagai salah satu fokusnya. Strategi ini mencakup berbagai tindakan untuk mengatasi tantangan penanganan banjir, termasuk penggunaan sistem polder, peningkatan kapasitas pompa dan pintu air, dan peningkatan sistem peringatan dini.

Kolaborasi dengan institusi internasional: Partisipasi Semarang dalam jejaring 100RC telah memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan institusi internasional seperti Rockefeller Foundation dan Mercy Corps, yang dapat mendukung upaya kota dalam penanganan banjir. Secara keseluruhan, partisipasi Semarang dalam jejaring 100 Resilient Cities telah memberikan kesempatan untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan dan keahlian, serta akses ke sumber daya yang telah membantu kota dalam menangani banjir.

### C.3. Promosi potensi lokal

Diplomasi kota dapat digunakan untuk mempromosikan potensi lokal Kota Semarang dalam penanganan banjir. Hal ini dapat menarik perhatian investor, lembaga internasional, atau pihak asing yang tertarik untuk berinvestasi dalam infrastruktur penanganan banjir, teknologi pengolahan air limbah, atau sistem drainase yang efektif. Terkait penanganan rob dan banjir, merupakan tugas yang sangat berat bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Namun begitu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob dilakukan kegiatan-kegiatan perawatan sungai-sungai secara berkala. Usaha tersebut terbukti efektif dalam menurunkan genangan banjir dan rob.

**Tabel 1.1**

**Penanganan Banjir di Kota Semarang**

| No | Indikator Kinerja                                                                           | Satuan | Tahun   |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|    |                                                                                             |        | 2015    | 2016    |
| 1  | Persentase kawasan banjir dan rob                                                           | %      | 5,34    | 5,02    |
| 2  | Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir | Menit  | 60      | 60      |
| 3  | Panjang sungai dan saluran drainase                                                         | Meter  | 206.506 | 206.506 |

|   |                                                     |              |        |        |
|---|-----------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| 4 | Kapasitas / fungsi drainase (luas areal tangkapan)  | Hektar       | 37.301 | 37.301 |
| 5 | Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder | Liter/ detik | 77.405 | 77.405 |

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

Berdasarkan data yang ada, terlihat menurunnya persentase kawasan banjir dan rob dari 5,34% di tahun 2015 menjadi 5,02% di tahun 2016. Penanganan banjir dan rob di Kota Semarang dapat dikatakan cukup berhasil, namun dengan masih adanya kawasan yang tergenang banjir dan rob mengindikasikan bahwa di Kota Semarang masih terdapat saluran, drainase dan goronggorong yang belum berfungsi optimal. Hal ini disebabkan juga karena kondisi di lapangan saat ini masih terdapat infrastruktur pengendali rob dan banjir yang belum terbangun secara menyeluruh (misalnya polder Banger, kolam retensi yang masih dalam proses pembangunan) sehingga sistem drainase belum dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam mengatasi masalah banjir dan rob di Kota Semarang. Pelaksanaan penanganan banjir dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan tata laksana, kerjasama penanganan banjir dan rob dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta kerjasama internasional. Penanganan banjir dan rob itu meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, polder serta pembangunan tendon air dan sumur resapan/biopori dan penanganan konservasi lahan.

#### C.4. Penggalangan dukungan finansial

Diplomasi kota dapat digunakan untuk menggalang dukungan finansial dari lembaga internasional, pemerintah pusat, atau pihak asing dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Melalui diplomasi yang efektif, Kota Semarang dapat memperoleh dana dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek-proyek penanganan banjir. Program Blue Deal dari Pemerintah Belanda: Pada Juli 2023, Pemerintah Kota Semarang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Belanda melalui program Blue Deal yang diharapkan bisa mempercepat penanganan banjir di kota tersebut.

Ada banyak lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang memberikan dukungan dana dan program untuk penanganan banjir di kota Semarang. Direktur Amrta Institute for Water Literacy Nila Ardhianie mengatakan, banjir di Kota Semarang merupakan

salah satu permasalahan lingkungan yang butuh penanganan serius. Oleh karenanya, sejumlah peneliti dan akademisi melakukan penelitian terkait hal itu. “Sejak Oktober 2020 – Januari 2021, Konsorsium Ground Up yang terdiri dari akademisi dan kelompok masyarakat sipil (IHE Delft Institute for Water Education, University of Amsterdam, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Amrta Institute dan KruHA) melakukan penelitian mengenai akses terhadap dan risiko terkait air di Kota Semarang.

Peningkatan kapasitas pompa dan pintu air: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah memberikan instruksi untuk menambah kapasitas pompa dan pintu air dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Peningkatan jumlah pompa: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) akan menambah jumlah pompa dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Rencana strategis: Pemerintah Kota Semarang telah memiliki rencana strategis dalam menghadapi potensi bencana yang ada di kota tersebut, termasuk penanganan banjir. Pembuatan waduk dan normalisasi sungai: Pemerintah telah melakukan pembuatan waduk Jatibarang, normalisasi sungai Banjir Kanal Barat (BKB), serta sistem drainase kota, yakni Kali Semarang, Kali Baru, dan Kali Asin yang merupakan satu sistem dengan BKB.

### **C.5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah**

Diplomasi kota dapat membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan banjir melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan, atau program kerjasama dengan kota atau daerah lain. Dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, Kota Semarang dapat mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi masalah banjir. Dengan menerapkan konsep diplomasi kota dalam penanganan banjir di kota Semarang, diharapkan dapat tercipta kerjasama yang lebih luas, promosi potensi lokal yang lebih baik, partisipasi aktif dalam forum internasional, penggalangan dukungan finansial, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu Kota Semarang dalam mewujudkan kota yang bebas banjir.

Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kota Semarang dalam mengatasi banjir, UCLG ASPAC dapat berperan dalam memfasilitasi program, jaringan, dan kemitraan untuk mengembangkan kapasitas pemerintah dan asosiasi pemerintah daerah di Kota Semarang. Melalui program-program seperti kerjasama desentralisasi, advokasi, peningkatan kapasitas dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan proyek, UCLG ASPAC

dapat membantu Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi banjir.

#### **D. Simpulan**

Diplomasi Kota Semarang dalam mewujudkan kota bebas banjir melibatkan upaya memperkuat lokalitas, pembentukan badan penanggulangan bencana, revitalisasi Kota Lama Semarang, rencana strategis, dan program Dinas Lingkungan Kota Semarang. upaya diplomasi dengan pihak luar negeri dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi banjir di Kota Semarang. Kerjasama dengan pihak luar negeri dapat membantu dalam hal pendanaan, teknologi, dan pengetahuan dalam mengatasi banjir. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang dapat memanfaatkan jejaring internasional seperti United Cities and Local Governments (UCLG) untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dalam mengatasi banjir di kota tersebut.

untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dalam mengatasi banjir di kota tersebut. Selain itu, diplomasi juga dapat dilakukan dengan pihak terkait dalam negeri, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya, untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan banjir.

#### **Daftar Pustaka**

- Acuto, M. (2013). *Global Cities, Governance and Diplomacy: The Urban Link*. London: Routledge.
- Asdak, Chay. (1995). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kauppi, M. V., & Viotti, P. R. (1998). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon.
- O'Toole, K. (2001). Australian and Japanese Sister City Type Relationships. *Australian Journal of International Affairs*.
- Pluijm, R. v., & Melissen, J. (2007). *City Diplomacy: The Expanding Role of Cities*. The Hague: Clingendael.
- Sustianingsih, Hermini, Nadia Farabi, Satwika Paramasatya & Sheiffi Puspapertiwi (2018), Memperkuat Lokalitas Kota Semarang di Era Globalisasi melalui Diplomasi Lokal, *Global & Strategis, Th. 12, No. 1, Januari - Juni 2018*
- Fathun, L. M., 2016: Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10430>

[https://semarangkota.go.id/p/33/profil\\_kota](https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota)

[https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/localise-sdgs-peran-penting-pemerintah-daerah-jadi-sorotan-untuk-pemulihan\\_id?s=168](https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/localise-sdgs-peran-penting-pemerintah-daerah-jadi-sorotan-untuk-pemulihan_id?s=168)